



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIRA PUSPITA DEWI
2. Jabatan : SEKRETARIS LNSW
3. NHK : 124055

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.477.084.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 653.550.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 396.400.000
3. Tanah Seluas 197 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 428.672.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/36 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 161.770.000
5. Tanah Seluas 117 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 254.592.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 345 m2/70 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 334.300.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/27 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 247.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 788.800.000**

1. MOBIL, HONDA CRV PRESTIGE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 23.800.000



3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 445.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	590.104.950
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.166.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	803.263.807
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.968.660.263
Sub Total	Rp.	7.793.913.020
III. HUTANG	Rp.	572.353.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.221.560.020

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.